

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Siak adalah sebuah daerah muda yang baru terbentuk pada tahun 1999. Segera setelah pemekarannya dari Kabupaten Bengkalis tersebut, Siak menjadi salah satu daerah yang produktif akan hasil minyak bumi dan manufakturnya di Provinsi Riau.¹ Namun, yang paling dikenal dari Siak adalah Istana Asserayah al-Hasyimiyah, atau sering disebut Istana Siak dan peninggalan sejarahnya. Apabila kita mengobservasi kecil-kecilan, misalnya mencari kata kunci Siak di *browser* internet ataupun media sosial lainnya, maka kita sering diarahkan kepada konten Istana Siak, atau lebih luasnya sejarah Kesultanan Siak Sri Indrapura. Pemerintah Kabupaten Siak, dengan anggaran yang melimpah, juga gencar melakukan pembangunan objek wisata beserta fasilitasnya di sekitar kawasan cagar budaya Kesultanan Siak Sri Indrapura, di mana Istana Siak menjadi *centrepiece*. Pariwisata yang dikembangkan pemerintah daerah juga mengusung

¹ Berdasarkan data *Siak dalam Angka*, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Siak sektor pertambangan, yang sebagian besar adalah minyak bumi dan gas, adalah sekitar Rp 21 triliun pada tahun 2010, melonjak hingga lebih dari Rp 40 triliun pada tahun 2012-2014, dan menurun seiring harga minyak bumi global sejak itu, yang pada tahun 2023 sekitar Rp 28 triliun. Sementara itu, PDRB sektor manufaktur (termasuk pengolahan *pulp*) naik secara konsisten, dari Rp 17 triliun pada tahun 2010, Rp 28 triliun pada tahun 2015, hingga Rp 43 triliun pada tahun 2023.

tema sejarah dan budaya.² Intinya, Kabupaten Siak sering diasosiasikan dengan Istana Siak, atau warisan sejarah Kesultanan Siak Sri Indrapura.

Hal ini bukannya tidak berdasar. Kesultanan Siak Sri Indrapura adalah sebuah kerajaan besar yang pernah berdiri di pesisir timur Sumatera. Keberadaannya unik di antara kerajaan-kerajaan Melayu lainnya, karena masyarakatnya merupakan percampuran antara masyarakat lokal, perantau Minangkabau, dan orang Melayu; sebuah kombinasi masyarakat yang dalam bahasa Barnard disebut *kacu*.³ Kekuatan angkatan lautnya membuat Kesultanan Siak ditakuti sepanjang Selat Malaka.⁴ Dengan kekuasaannya yang mencapai wilayah pesisir timur Sumatera (termasuk Medan dan sekitarnya), Kesultanan Siak menjadi kerajaan yang disegani oleh takluk jajahannya seperti Kesultanan Deli dan Asahan bahkan beberapa masa setelah daerah tersebut bebas dari kekuasaan Siak.⁵

Penjajahan Belanda dan kemerdekaan Indonesia selanjutnya meredupkan identitas Siak, baik sebagai wilayah maupun sejarah kesultannya. Hal ini disebabkan selama zaman Kolonial Kesultanan Siak tidak dapat berkembang pesat sebagaimana kota-kota lainnya di Sumatera, meskipun masih bisa mengandalkan pelayaran yang lalu lalang sepanjang Sungai Siak. Setelah kemerdekaan Indonesia,

² Abdul Harits Ritonga dan Siti Fatimah, “Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Kesultanan Siak Sri Inderapura sebagai Objek Wisata (2006-2019)”, *Kronologi*, vol. 2 no. 4 tahun 2020, hlm. 124.

³ Timothy P. Barnard, *Multiple Centres of Authority: Society and Environment in Siak and Eastern Sumatra, 1674-1827* (Leiden: KITLV Press, 2003), hlm. 1-2.

⁴ John Anderson, *Mission to the east coast of Sumatra in 1823* (Edinburgh: William Blackwood, 1826), hlm. 342.

⁵ “Een bladzijde geschiedenis” Het nieuws van den daag voor Nederlandsch-indie, 23 September 1924.

wilayahnya dimasukkan sebagai sebuah kecamatan dalam Kabupaten Bengkalis, Riau. Bila wilayah Riau sebagai bagian Sumatera Tengah pada tahun 1950-1957 dianggap tidak diperhatikan,⁶ maka terlebih lagi Kecamatan Siak. Situasi ini tidak berubah ketika Provinsi Riau dibentuk, dan tidak pernah berubah sampai akhir periode Orde Baru.

Situasi ini diperparah dengan sentralisme Orde Baru, misalnya dalam hal politik dengan menolak aspirasi daerah mengenai kepala daerah mereka, atau dalam hal ekonomi dengan penguasaan sektor minyak bumi yang hasilnya tidak dinikmati oleh daerah,⁷ dan lain sebagainya. Namun, hal ini tidak menghilangkan ingatan masyarakat Siak mengenai sejarah mereka. Perjuangan pembentukan Kabupaten Siak dengan wilayah hampir seluas wilayah Kesultanan Siak zaman kolonial dapat dianggap sebagai representasi ingatan sejarah tersebut.⁸ Segera setelah pembentukan Kabupaten Siak, mereka memanfaatkan warisan sejarah Kesultanan Siak Sri Indrapura untuk membangun identitasnya, mulai dari Istana Siak sebagai fitur lambang Kabupaten Siak, hingga pemanfaatan cagar budaya Istana Siak dan sekitarnya sebagai objek wisata Kabupaten Siak.

Dengan latar belakang sejarahnya, pembentukan Kabupaten Siak dan penonjolan identitas Kesultanan Siak Sri Indrapura melahirkan fenomena lain. Beberapa orang yang mengaku sebagai keturunan sultan Siak mengklaim sebagai

⁶ Gusti Asnan, *Memikir ulang regionalisme: Sumatera Barat tahun 1950-an* (Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 230.

⁷ Destra Wati, Nopriyasan dan Wannofri Samry, "Riau Pascakeluar dari Sumatera Tengah 1957-1985", *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, vol. 7 no. 1, tahun 2020, hlm. 41-49.

⁸ Proses pembentukan Kabupaten Siak dapat dilihat lebih lanjut dalam *Sejarah Pembentukan Kabupaten Siak*.

sultan baru dan berupaya mendirikan kembali Kesultanan Siak Sri Indrapura. Meskipun mendapat dukungan dari beberapa pihak, banyak yang mengecam aksi ini. Dalam kasus terakhir di mana Tengku Nazir menabalkan diri sebagai sultan Siak, berbagai tokoh masyarakat menolak klaimnya,⁹ termasuk lembaga yang dianggap resmi mewakili Kesultanan Siak, Kekerabatan Resam Keluarga Kerajaan Siak.¹⁰

Klaim sultan Siak baru ini adalah bagian dari fenomena “kembalinya para sultan” pada masa setelah Reformasi. Fenomena ini telah dilihat oleh Van Klinken sebagai contoh gerakan identitas daerah masa Reformasi dan konsekuensi dari otonomi daerah. Beberapa institusi monarki (kesultanan, kerajaan, kedatuan dan sejenisnya) didirikan kembali, bukan untuk menegaskan kedaulatan politik mereka, melainkan atas nama pelestari adat dan budaya daerah.¹¹ Contoh gerakan pendirian kesultanan di Indonesia yang berhasil adalah Kesultanan Kutai Kartanegara pada tahun 2001 yang, bersama dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, membentuk identitas kebudayaan daerah tersebut, seperti pembangunan Kedaton

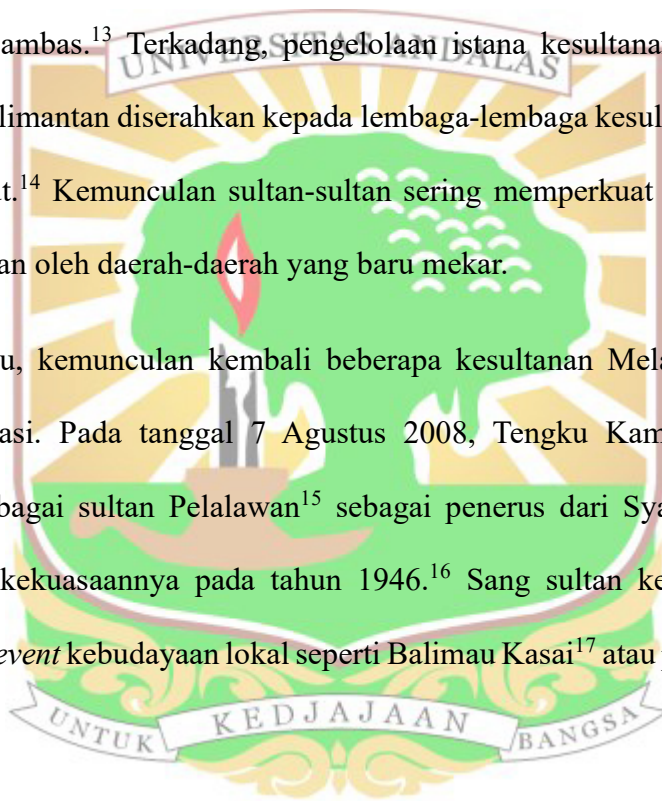
⁹ “Penabalan Tengku Muhammad Nazir sebagai Sultan Siak XII Ditolak Zuriyat Syah” <https://potret24.com/artikel/penabalan-tengku-muhammad-nazir-sebagai-sultan-siak-xiii-ditolak-oleh-zuriyat-syah/>, diakses tanggal 7 Februari 2025.

¹⁰ “PERNYATAAN LEMBAGA KEKERABATAN RESAM KELUARGA KERAJAAN SIAK TERKAIT PENOBATAN SULTAN SIAK KE-13”, <https://www.youtube.com/watch?v=thtR2bp11BI>, diakses tanggal 14 Juni 2023; lihat juga “Zuriyat Sah Kesultanan Siak Tolak Penabalan Tengku Muhammad Nazir sebagai Sultan Siak XIII”, <https://www.cakaplah.com/berita/baca/85887/2022/06/15/zuriyat-sah-kesultanan-siak-tolak-penabalan-tengku-muhammad-nazir-sebagai-sultan-siak-xiii#sthash.YG8Ip70.dpbs>, diakses tanggal 14 Juni 2023.

¹¹ Gerry van Klinken, “Return of The Sultans: the Communitarian Turn in Local Politics,” dalam *The Revival of Tradition in Indonesian Politics: the Deployment of Adat from Colonialism to Indigenism* (London: Routledge, 2007) hlm. 149-151.

Kutai Kartanegara hingga menyelenggarakan *event* tahunan Festival Erau.¹² Berbagai daerah di Kalimantan juga menghidupkan kesultanannya kembali, seperti Landak dan Sambas.¹³ Terkadang, pengelolaan istana kesultanan yang menjadi museum di Kalimantan diserahkan kepada lembaga-lembaga kesultanan yang telah berdiri tersebut.¹⁴ Kemunculan sultan-sultan sering memperkuat identitas daerah yang dibutuhkan oleh daerah-daerah yang baru mekar.

Di Riau, kemunculan kembali beberapa kesultanan Melayu juga terjadi pasca Reformasi. Pada tanggal 7 Agustus 2008, Tengku Kamaruddin Harun, dinobatkan sebagai sultan Pelalawan¹⁵ sebagai penerus dari Syarif Harun yang menyerahkan kekuasaannya pada tahun 1946.¹⁶ Sang sultan kemudian banyak terlibat dalam *event* kebudayaan lokal seperti Balimau Kasai¹⁷ atau penganugerahan



¹² Fadli Afriandi & Fachriza Ariyadi, “Efek Domino Pasca Dibangkitkannya Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura”, *Reformasi* Vol. 10 No. 2, 2020, hlm. 127-139

¹³ Gerry van Klinken, op. cit., hlm. 149

¹⁴ Bernard Sellato, “Sultans’ Palaces and Museums in Indonesian Borneo: National Policies, Political Decentralization, Cultural Depatrimonization, Identity Relocalization, 1950-2010”, *Archipel* [Online] no. 89 tahun 2015, hlm. 143.

¹⁵ Meskipun catatan dan dokumentasi peristiwa ini belum ditemukan, perwakilan Kesultanan Pelalawan menegaskan penobatan Syarif Kamaruddin pada tanggal tersebut saat membuat klarifikasi terkait sebuah insiden, “Pers Rilis Lembaga Perangkat Kesultanan Pelalawan” <https://radarpekanbaru.com/news/detail/19274/pers-rilis--lembaga-perangkat-kesultanan-pelalawan-lpkp>, diakses tanggal 31 Januari 2024.

¹⁶ Desi Purnama Indah, Isjoni & Kamaruddin, “Pemerintahan Sultan Syarif Harun di Kerajaan Pelalawan Tahun 1940-1945”, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Keguruan dan Ilmu Pendidikan* Vol. 4 No. 2, 2017, hlm.

¹⁷ “Mandi Balimau Sultan Tradisi Turun Temurun Menyambut Bulan Suci Ramadhan di Negeri Seiya Sekata”, <https://pelalawanpos.co/news/detail/1079/mandi-balimau-sultan-tradisi-turun-temurun-menyambut-bulan-suci-ramadhan-di-negeri-seiya-sekata>, diakses tanggal 31 Januari 2024.

gelar adat.¹⁸ Kerajaan Gunung Sahilan didirikan kembali pada 22 Januari 2017.¹⁹ Berbeda dengan fenomena “kembalinya para sultan” di Riau, klaim sultan Siak dan upaya mendirikan kembali Kesultanan Siak Sri Indrapura malah menimbulkan kontroversi.

Keberadaan Kesultanan Siak Sri Indrapura, kekhasan kebudayaan Siak dalam sejarahnya, redupnya identitas Siak semasa Kolonial Belanda hingga Orde Baru, kemunculan kembali identitas Siak yang melahirkan pembentukan Kabupaten Siak serta pemanfaatan identitas kesultanan, hingga munculnya fenomena klaim sultan Siak baru adalah menarik untuk dikaji. Oleh sebab itu, penulis menyelenggarakan penelitian dengan hasil sebuah tesis berjudul “Identitas Kesultanan Siak Sepanjang Sejarah (1723-2023).”

1.2. Perumusan Masalah

Masalah pokok pada penelitian ini adalah perkembangan identitas Kesultanan Siak Sri Indrapura, yang dibagi dalam tiga keadaan. Pertama, ketika Kesultanan Siak masih berdiri sebagai kerajaan merdeka dan memiliki kekuasaan yang luas. Kedua, ketika Kesultanan Siak berada di bawah kekuasaan yang lebih kuat darinya, yakni Belanda, dan kemudian Indonesia. Ketiga, ketika Kesultanan

¹⁸ “Ketua DPD RI Menerima Penganugerahan Gelar Adat dari Kesultanan Pelalawan”, <https://infopublik.id/kategori/nusantara/588511/ketua-dpd-ri-menerima-penganugerahan-gelar-adat-dari-kesultanan-pelalawan?show=>, diakses tanggal 31 Januari 2024.

¹⁹ “Penobatan Pewaris Kerajaan Gunung Sahilan Kampar Dihadiri Raja Raja Se-Nusantara” <https://riaukarya.com/read/detail/714/regional/kampar/Dimulai%2018%20Desember%202024>, diakses tanggal 7 Februari 2025.

Siak sudah tidak ada lagi, yakni mereka yang masih hidup merekonstruksi identitas Kesultanan Siak Sri Indrapura.

Dengan demikian, penulis mengajukan tiga rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses perkembangan identitas Kesultanan Siak Sri Indrapura pada masa kedaulatannya secara penuh (1723-1858), apa saja identifikasi pembentukannya dan mengapa proses tersebut terjadi?
- b. Bagaimana proses perkembangan identitas Kesultanan Siak Sri Indrapura pada masa dikuasai oleh Belanda dan Indonesia (1858-1968), apa saja identifikasi pembentukannya dan mengapa proses tersebut terjadi?
- c. Bagaimana proses perkembangan dan dinamika identitas Kesultanan Siak Sri Indrapura dengan tidak adanya kesultanan tersebut (1968-2023), apa saja identifikasi pembentukannya, apa saja fenomena yang terjadi dan mengapa hal tersebut terjadi?

1.3. Pembatasan Masalah Penelitian

Penulis membatasi penelitian ini, dari segi spasial, di dalam ranah pembahasan Kesultanan Siak Sri Indrapura dan Kabupaten Siak. Kesultanan Siak merupakan objek kajian penelitian ini, dan Kabupaten Siak kurang lebih dapat dianggap sebagai penerus wilayah bekas Kesultanan Siak. yang dalam sejarah merupakan tempat berkembangnya Kesultanan Siak Sri Inderapura. Fokus penulis terpusat pada wilayah historis tersebut. Dari segi temporal, penulis mengambil titik kajian dari tahun 1723 hingga 2023. Tahun 1723 adalah berdirinya Kesultanan Siak

Sri Indrapura, meskipun latar belakangnya dapat ditarik sedikit jauh dari tahun 1699 yang diyakini tahun kelahiran Raja Kecil. Tahun 2023 adalah aktivitas terakhir Tengku Nazir, pengklaim sultan Siak, yang masih dapat dilacak. Panjangnya rentang waktu ini adalah untuk menunjukkan bahwa terjadi perubahan, kesinambungan, dan keterputusan pada identitas Kesultanan Siak Sri Indrapura.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis bertujuan untuk:

1. Menganalisis pembentukan dan perkembangan identitas Kesultanan Siak Sri Indrapura pada masa kedaulatannya (1723-1858).
2. Menganalisis pembentukan dan perkembangan identitas Kesultanan Siak Sri Indrapura pada masa dikuasai hingga Syarif Kasim II meninggal (1858-1968).
3. Menganalisis pembentukan dan perkembangan identitas Kesultanan Siak Sri Indrapura setelah kesultanan tersebut tidak ada lagi (1968-2023), termasuk fenomena yang muncul dan analisisnya.

Penelitian ini bermanfaat dari segi teoretis dan praktis. Penelitian mengenai identitas daerah berdasarkan sejarah monarki dan kemunculan monarki di Indonesia pasca Reformasi masih sangat sedikit, sehingga penelitian ini akan membantu memperkaya literatur mengenai hal tersebut, begitu juga dengan ragam motif dan model kemunculan monarki yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini juga akan bermanfaat untuk memberi perspektif baru berkaitan dengan kebudayaan (*tamaddun*) Melayu dan unsur-unsurnya.

Segi praktis penelitian ini adalah memberikan pemahaman terhadap persoalan yang dihadapi pihak-pihak berkonflik terkait dengan pihak yang berupaya mendirikan kembali Kesultanan Siak Sri Inderapura, begitu juga dengan kasus yang sama di Indonesia.

1.5. Tinjauan Pustaka

Karya terbaik mengenai dinamika identitas Kesultanan Siak adalah *Multiple Centres of Authority: Society and Environment in Siak and Eastern Sumatra, 1674-1827*, ditulis oleh Timothy P. Barnard.²⁰ Karakteristik pesisir timur Sumatera menyebabkan corak Kesultanan Siak berbeda dengan negeri-negeri Semenanjung Melayu. Dari bentang alam, wilayah tersebut merupakan hutan tropis yang lebat di timur, memanjang hingga ke hamparan hutan bakau berawa, dan bermuara ke Selat Malaka yang ramai. Dari segi sosial, wilayah ini merupakan tempat tinggal berbagai macam suku bangsa, seperti perantauan Minangkabau, orang Melayu, masyarakat lokal, hingga pedagang India, Tionghoa, Arab, Jawa, Bugis, dan lain sebagainya. Kemampuan seorang raja dalam menghimpun masyarakat ini terbukti menentukan apakah kehidupan Kesultanan Siak berlangsung damai atau terjadi kekacauan.

Karya spesifik dan detail mengenai kerajaan-kerajaan Nusantara yang muncul pada masa Reformasi adalah karya Gerry van Klinken yang berjudul “Return of The Sultans: The Communitarian Turn in Local Politics”.²¹ Van Klinken telah mengamati maraknya kemunculan sultan-sultan di berbagai daerah di

²⁰ Timothy P. Barnard, *op. cit.*

²¹ Gerry van Klinken, *op. cit.*, hlm. 149-169.

Indonesia sekitar era Reformasi dan setelahnya. Van Klinken mencatat 25 kerajaan yang ada di Indonesia—meski tidak mewakili daftar seluruh monarki se-Indonesia—16 di antaranya dimunculkan melalui pemulihan (*resurreciton*) dan pembentukan kembali (*reinvention*). Pemulihan terjadi pada kesultanan yang dihapuskan pada masa Republik Indonesia oleh kebijakan Sukarno, sedangkan pembentukan kembali terjadi pada kesultanan yang bubar jauh pada masa Hindia Belanda. Beberapa sultan yang masih bertahan meningkatkan citra mereka untuk mendapat simpati di hadapan publik. Ia mendiskusikan bagaimana memahami kemunculan ‘kesultanan’ di Indonesia kontemporer sebagai bentuk negosiasi republikanisme dengan kebudayaan lokal, bukan sebuah langkah kemunduran, melainkan sebagai “penawar dari perpecahan modernitas” dan membawa “keharmonisan sosial baru” dengan peran mereka sebagai pengayom budaya. Namun, ia tetap mewaspadaikan sikap oportunisme feodalistik yang bisa muncul dan pengabaian peran baru mereka sendiri terhadap permasalahan daerah yang membutuhkan kharisma seorang tokoh lokal.

Mengenai kondisi kesultanan-kesultanan Melayu di Indonesia, Hakimul Ikhwan dan Fachry Aidulsyah menulis “Sultanates and the Making of Nationhood in Indonesia and Malaysia”.²² Tulisan ini adalah perbandingan antara kesultanan di Malaysia dan Indonesia, mulai dari latar belakang perlakuan kolonial hingga situasi pascakolonial. Kolonialisme Inggris di Malaya menciptakan “pemerintahan kolonial tidak langsung” dengan memanfaatkan sultan yang berkuasa dalam

²² Hakimul Ikhwan & Fachry Aidulsyah, “Sultanates and the Making of Nationhood in Indonesia and Malaysia”, dalam *Asian Journal of Social Science* no. 48 tahun 2020, hlm. 339-352

administrasi mereka. Kontras, pemerintahan Hindia Belanda selalu bersifat antagonis dengan otoritas lokal dan menciptakan sistem baru yang menumpangtindihkan sistem lama. Popularitas republikanisme di Indonesia telah mencoreng citra kesultanan yang dianggap feodal dan tidak mendukung Republik Indonesia, dan meskipun pemerintah memberi kesempatan eksistensi mereka dengan memberi status swapraja, peran politik mereka akhirnya lenyap oleh rezim Sukarno dan Suharto. Malaysia yang mengadopsi federalisme telah menjaga eksistensi kesultanan Melayu dengan memberi kuasa mereka sebagai kepala negara masing-masing negeri. Sementara perkembangan kesultanan di Indonesia kemudian diasosiasikan dengan pelestarian adat, institusi kesultanan di Malaysia semakin penting sebagai pelestari agama Islam dan bangsa Melayu di tengah multikulturalisme negara tersebut.

Salah satu kasus *resurrection* monarki yang juga termasuk dalam kasus kemunculan monarki di Indonesia pasca Reformasi adalah Kerajaan Pagaruyung. Meskipun baru direstorasi pada tahun 2004, ide dan faktor pencetusnya telah berkembang beberapa dekade sebelumnya, dengan Istana Basa Pagaruyung sebagai representasi. Nopriyasman dalam “Politik Representasi Istana Basa Pagaruyung sebagai Identitas Minangkabau di Sumatera Barat”²³ telah meneliti Istana Basa Pagaruyung sebagai pembangkit citra Minangkabau dan sejarahnya yang gemilang, di tengah hegemoni politik Orde Baru yang sentralistik dan menuntut keseragaman. Representasi istana monumental tersebut membawa dampak, salah satunya

²³ Nopriyasman, “Politik Representasi Istana Basa Pagaruyung sebagai Identitas Minangkabau di Sumatera Barat”, *disertasi* (Denpasar: Program Studi Kajian Budaya Program Pascasarjana Universitas Udayana, 2011), *passim*.

dimanfaatkan oleh golongan keturunan raja Pagaruyung untuk merestorasi institusi Yang Dipertuan Rajo Alam beserta perangkat-perangkatnya, ditambah dengan relasi yang baik dengan institusi budaya lokal, sehingga restorasi itu terwujud secara resmi pada tahun 2004. Kasus lainnya adalah Kesultanan Jailolo di timur²⁴ dan Cirebon di Jawa Barat.²⁵

Mengenai Kesultanan Siak Sri Inderapura, penulis mengambil sebuah karya sejarah yang menyinggung Sultan Syarif Kasim II dan kemungkinan suksesinya. *Sejarah Kerajaan Siak*, karya O.K. Nizami Jamil *et al.*²⁶ menceritakan sejarah Kesultanan Siak Sri Indrapura secara detail sejak pendiriannya oleh Raja Kecil pada akhir abad 18 hingga wafatnya sultan Siak terakhir pada 1969. Salah seorang penulisnya, Nizami Jamil, adalah anak dari seorang sekretaris Sultan Syarif Kasim II yang menjadi saksi sejarah Siak pada masa kemerdekaan Indonesia. Berbeda dengan sultan sebelumnya, tulisan mengenai sultan terakhir tersebut sangat bernuansa nasionalistik, mulai dari perlawanan diam-diam terhadap kolonial Belanda, perannya dalam masa pendudukan Jepang, hingga dukungannya terhadap Republik Indonesia, termasuk menyumbangkan 13 juta Gulden untuk pemerintahan republik. Dalam bab terakhir, mereka membahas kemungkinan penerus Sultan Syarif Kasim II, yang telah mengintegrasikan diri ke dalam Republik Indonesia dan tidak menghasilkan keturunan sebelum kesultanan itu

²⁴ Mustafa Mansur dan Rusli M. Said, *Dinamika Sosial-Politik Kesultanan Jailolo (2002-2017)*, *Jurnal Etnohistori*, Vol. V, No. 2, Tahun 2018 110-135.

²⁵ Shelvy Nujuliyani, "Suksesi dan Konflik (Studi atas Jumenengan Sultan Sepuh XV Keraaton Kasepuhan Cirebon pada Tahun 2020)", *skripsi* (Jakarta: Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021), *passim*.

²⁶ O.K. Nizami Jamil *et al.*, *op. cit.*, hlm. 185-186.

berakhir. Sang sultan memiliki adik tiri yang bernama Tengku Long Putih. Sepertinya para penulis telah sadar bahwa ada beberapa pihak yang ingin mengklaim takhta—atau harta—Kesultanan Siak Sri Inderapura, sehingga mereka memberi contoh bahwa sang adik tiri sultan tidak dapat mengklaim takhta Siak karena telah menjadi warga negara Singapura dan menikahi seorang Belanda Kristen.

Dari segi peninggalan pada masa kontemporer, topik yang sering diusung berkaitan dengan sejarah Kesultanan Siak Sri Inderapura adalah bagaimana objek tersebut dipelihara dan dimanfaatkan sebagai cagar budaya. “Hubungan Perkembangan Kota Siak Sri Indrapura dengan Kawasan Cagar Budaya Istana Asserayah Al-Hasyimiah” karya Aidil Kurniawan²⁷ mengamati bagaimana pemerintah Kabupaten Siak mengatur pembangunan dan tata kota di sekitar kawasan cagar budaya Kesultanan Siak Sri Indrapura. Penulis sendiri juga telah meneliti bagaimana Kabupaten Siak merancang dan melaksanakan pariwisata sejarah dan budaya di kawasan cagar budaya tersebut sesuai dengan kriteria *sustainable tourism*.²⁸

1.6. Kerangka Teoretis

Penelitian ini berfokus pada identitas yang berkembang pada Kesultanan Siak Sri Indrapura. Kwame Anthony Appiah berpendapat sebagai berikut. *Pertama*,

²⁷ Aidil Kurniawan, “Hubungan Perkembangan Kota Siak Sri Indrapura dengan Kawasan Cagar Budaya Istana Asserayah Al-Hasyimiah”, *skripsi* (Yogyakarta: Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, 2017).

²⁸ Abdul Harits Ritonga & Siti Fatimah, *loc. cit.*

Setiap identitas datang dengan pelabelan, sehingga untuk memahami identitas seseorang harus memahami label tersebut. *Kedua*, identitas tersebut dianggap penting bagi pemegangnya. Hal ini karena identitas dapat memberikan gambaran bagaimana seseorang dapat cocok dengan dunianya. Selain itu, identitas membentuk pikiran dan tindakan pemegangnya, yakni alasan mengapa mereka berpikir atau bertindak dengan cara tertentu. *Ketiga*, identitas membentuk pikiran dan tindakan orang lain kepada pemegang identitasnya, baik terhadap sesama ataupun orang-orang yang berbeda identitas.²⁹

Stuart Hall menjelaskan ada dua posisi berbeda dalam memahami identitas budaya. Posisi *pertama* menjelaskan konsep identitas budaya sebagai sebuah budaya bersama yang satu, berdasarkan kesamaan keturunan dan sejarah, yang semacam ‘jati diri’ yang kolektif, sebagai ‘sebuah bangsa’.³⁰ Konsepsi identitas budaya semacam ini memainkan peran penting dalam perjuangan bangsa yang terjajah, termasuk Indonesia dengan beribu latar sosial-budaya yang berbeda disatukan dengan penjajahan Belanda dan kesamaan rumpun. Pandangan kedua adalah bahwa sebagaimana banyak persamaan, ada titik kritis perbedaan yang mendalam dan signifikan, yang membentuk “apakah kita yang sebenarnya”, atau—karena keterlibatan sejarah—“kita telah menjadi apa”. Identitas budaya datang dengan sejarah, yang tentu mengalami perubahan.³¹

²⁹ Kwame Anthony Appiah, *The Lies that Bind: Rethinking Identity: Creed, Country, Colour, Class, Culture* (London-New York: Liveright Publishing Corporation, 2018), hlm. 10-14.

³⁰ Stuart Hall, “Cultural Identity and Diaspora”, dalam Jonathan Rutherford, *Identity: Community, Culture, Difference* (London: Lawrence & Wishart), hlm. 223.

³¹ Ibid., hlm. 225.

Setiap identitas kebudayaan dibentuk oleh suatu kelompok melalui penciptaan simbol-simbol budaya berikut makna dan gagasannya, yang kemudian memiliki sejarah dan dilestarikan turun temurun. Dari perspektif komunikasi, sebuah identitas budaya diciptakan, dinegosiasikan, diteguhkan, dan ditantang melalui komunikasi. Identitas tersebut muncul ketika terjadi pertukaran pikiran antar manusia. Persamaan dan perbedaan identitas bergantung pada posisi seseorang (kelompok) dengan orang (kelompok) lain, pentingnya identitas tersebut bagi mereka masing-masing, topik dan konteks, serta interpretasi dan atribusi. Karakteristik dari identitas budaya terdiri dari tujuh macam yaitu: sudut pandang pribadi, yakni *avowal* (pengakuan dari diri sendiri) dan *ascription* (pengakuan dari orang lain); cara mengekspresikan identitas tersebut, yakni melalui *core symbols* (simbol inti), *labels* (label) dan *norms* (norma); ruang lingkup identitas, baik secara individual, relasional, maupun komunal, sifat identitas antara bertahan (*enduring*) dan berubah (*changing*); komponen kognitif, afektif dan behavioral dari sebuah identitas; interpretasi dari kandungan dan relasinya, antar golongan yang saling berinteraksi; serta ciri khas (*salience*) dan ragamnya (*variation*).³²

Manuel Castells membagi tiga macam pembentukan identitas. Pertama, *legitimizing identity*, yakni identitas yang terbentuk dari lembaga sosial terstruktur yang dominan beserta agennya (aktor sosial) untuk memperluas dan menjadikan identitas itu masuk akal dalam kehidupan masyarakat. Kedua, *resistance identity*, muncul dari kelompok/masyarakat yang berada di dalam kondisi tertekan

³² Mary Jane Collier, "Cultural Identity and Intercultural Communication", dalam Larry A. Samovar, Richard E. Porter, Edwin R. McDaniel, Carolyn Sexton Roy, *Intercultural Communication: A Reader, 14th edition* (Boston: Cengage Learning, 2015), hlm. 56-59.

(direndahkan atau dilabeli stereotip) sehingga menegaskan diri dengan prinsip-prinsip, atau karakteristik, yang berbeda dengan masyarakat dominan. Ketiga, *project identity*, yakni ketika aktor sosial merangkai identitas baru berdasarkan modal budaya yang tersedia yang membentuk ulang posisi masyarakatnya dengan yang lain.³³

Untuk memahami kerajaan dalam penelitian ini, kita harus mendudukan konsep dasarnya. Monarki dalam bentuk aslinya adalah “a state ruled by a single absolute hereditary ruler” (suatu negara yang diperintah oleh seorang penguasa turun temurun yang mutlak)³⁴ dan merupakan salah satu bentuk pemerintahan tertua di dunia. Monarkisme berarti “a belief in the necessity or desirability of monarchy” (keyakinan akan kementerian dan keinginan pada monarki).³⁵ Namun, makna monarkisme berbeda menurut pembahasan zamannya. Ketika berbicara dalam konteks sebelum abad ke-18, monarkisme berkaitan dengan sikap ideal seorang raja dalam pemerintahannya yang absolut, terutama pada abad ke-17 dan 18,³⁶ dan setelah Revolusi Prancis monarki selalu dipasangkan dengan rivalnya, republikanisme. Pada masa kontemporer, pendukung monarkisme mengukung monarki terbatas dan mendasari dukungan tersebut pada kegunaan institusi tersebut

³³ Manuel Castells, *The Power of Identity*, 2nd edition (West Sussex: John Wiley & Sons Ltd., 2010), hlm. 8.

³⁴ Vernon Borgdanon, *The Monarchy and the Constitution* (New York: Clarendon Press, 1995), hlm. 1.

³⁵ Lincoln Allison, “Monarchism”, dalam Garret W. Brown, Iain McLean & Alistair McMillan (editor), *The Concise Oxford Dictionary of Politics & International Relations* (Oxford: Oxford University Press, 2018), hlm. 857-858.

³⁶ Hans Blom, John Christian Laursen, dan Luisa Simonutti, “Introduction, dalam Hans Blom, John Christian Laursen, dan Luisa Simonutti (ed.), *Monarchisms in the Age of Enlightenment: Liberty, Patriotism, and the Common Good* (Toronto: University of Toronto Press, 2007), hlm. 3-15.

dalam konteks tertentu, termasuk perwujudan simbolis dari sejarah suatu negara.³⁷ Penelitian kontemporer mengenai monarkisme membahas beberapa negara bekas monarki yang rakyatnya masih memiliki dukungan terhadap restorasi monarki seperti di Serbia, Rumania dan Bulgaria.³⁸

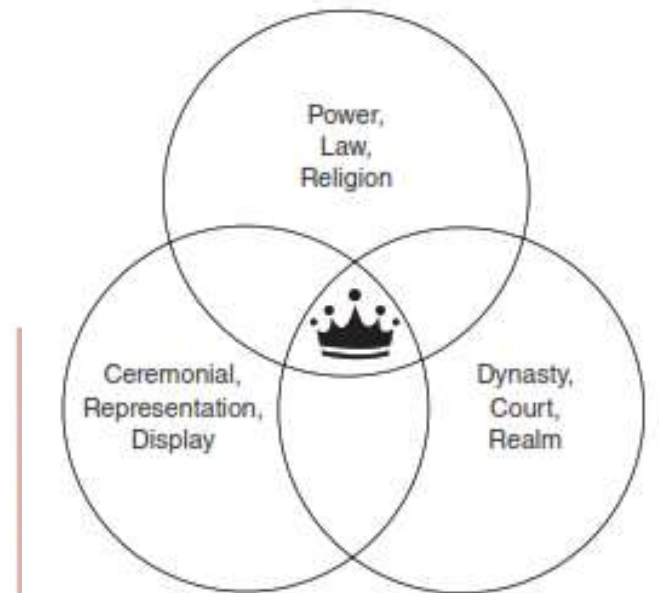
Namun, monarki sering dipahami dalam konteks politik skala besar, yaitu negara, baik absolut maupun konstitusional, dan sebagai lawan dari republikanisme. Membatasi konteks monarki sebagai institusi politik praktis akan menutupi diskusi dari aspek lain, seperti sosiologi dan antropologi. Secara khusus, kemunculan kembali monarki di Indonesia tidak membawa konsekuensi politik apapun. Untuk memahami monarki secara luas, Woodacre membuat konsepsi berdasarkan tiga area dengan masing-masing tiga komponen kunci.³⁹ Komponen penentu peran seorang raja terletak pada *power* (kekuasaan), *law* (hukum), dan *religion* (agama). Aspek ranah kekuasaan raja ialah *dynasty* (dinasti), *court* (“istana”, dapat juga bermakna “dewan”) dan *realm* (wilayah kekuasaan). *Ceremonial* (“upacara”, hal yang bersifat seremonial), *representation* (perwakilan) dan *display* (tampilan) berguna untuk menegaskan peran dan ranah kekuasaan raja tersebut.

³⁷ Lincoln Allison, *loc. cit.*

³⁸ Peter Sundström, "Emergence of monarchies? A Comparative study of three East European countries", *tesis* (Örebro: School of Humanities, Education and Social Sciences Örebro University 2014), hlm. 50-51.

³⁹ Elena Woodacre, “Understanding the Mechanisms of Monarchy”, dalam Elena Woodacre *et al.* (ed.), *The Routledge History of Monarchy* (New York: Routledge, 2019), 2-3.

Bagan 1
Elemen-elemen Kunci yang Membentuk Sebuah Monarki



Keterangan : Bingkai teoritis berbentuk diagram venn yang berisi tiga aspek dalam kajian tentang monarki

Sumber : Elena Woodacre, “Understanding the Mechanisms of Monarchy”, dalam Elena Woodacre *et al.* (editor), *The Routledge History of Monarchy* (New York: Routledge, 2019), hlm. 3.

Penulis menerapkan kerangka teoretis tersebut pada kasus identitas Siak Sri Indrapura sebagai sebuah monarki. Monarki (dalam berbagai nama seperti kerajaan, kesultanan, kadipaten dan sebagainya) memiliki sejarah panjang di Indonesia sejak kemunculan peradaban Hindu-Buddha, tetapi fokus penulis adalah identitas monarkinya, mulai dari masa kedaulatannya, masa kolonial Belanda hingga setelah kemerdekaan Indonesia. Belanda memberikan status *zelfbestuur* kepada berbagai monarki lokal di Hindia Belanda.⁴⁰ Dari status *zelfbestuur*, Pemerintah Republik

⁴⁰ Robert Cribb & Audrey Kahin, *Historical Dictionary of Indonesia*, (Oxford: Scarecrow Press, 2004), hlm. 462.

Indonesia membuka kesempatan pembentukan daerah istimewa⁴¹ dan swapraja.⁴² Daerah tersebut hanya dapat mempertahankan sistem pemilihan kepala daerah yang berasal “dari keturunan keluarga yang berkuasa”⁴³ dan sisanya “tidak berbeda dengan pemerintahan di daerah biasa; kekuasaan pemerintahan ada ditangan rakyat”.⁴⁴ Hampir tidak ada lagi daerah istimewa sejak tahun 1959,⁴⁵ dan sistem swapraja sepenuhnya dihapus pada tahun 1965.⁴⁶ Status swapraja dan penghapusannya menjadi salah satu faktor historis kemunculan kembali monarki di Indonesia pasca Reformasi, yang akan penulis bahas dalam bab berikutnya.

1.7. Metode Penelitian dan Bahan Sumber

Tesis ini disusun sebagai sebuah penelitian sejarah, yang melewati empat tahap klasik dari metode sejarah: heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi atau konstruksi sejarah.⁴⁷ Rincian metode penelitian tesis ini dipaparkan di bawah ini.

Penulis akan menelusuri sumber-sumber sejarah berkaitan dengan Kesultanan Siak Sri Inderapura. Sumber dokumen seperti arsip, silsilah keluarga

⁴¹ Penetapan daerah istimewa didasari oleh UU no. 22 tahun 1948

⁴² Penetapan daerah swapraja didasari oleh Konstitusi RIS pasal 64-67 dan UUDS 1950 pasal 132-133

⁴³ UU no. 22 Tahun 1948, pasal 18 ayat (5)

⁴⁴ UU no. 22 Tahun 1948, penjelasan nomor 22.

⁴⁵ Dengan penghapusan Daerah Istimewa Berau, Bulongan dan Kutai, melalui UU no. 27 Tahun 1959, maka hanya tersisa Daerah Istimewa Aceh dan Yogyakarta

⁴⁶ UU No. 18 Tahun 1965 pasal 88 ayat (3)

⁴⁷ Louis Gottschalk, *Understanding History: A Primer of Historical Method (2nd edition)* (New York: Alfred A. Knopf, 1969), hlm. 52; Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2007, hlm. 13.

kerajaan, surat-surat kerajaan, berita koran dan media elektronik kebanyakan didapat dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak dan Provinsi Riau, serta berbagai *website* berita terkait. Sumber literatur berupa tulisan-tulisan ilmiah dan karya sejarah lainnya berkaitan dengan dua kesultanan tersebut, yang mudah didapat di Perpustakaan Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, dan Kabupaten Siak.

Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak terkait dengan Kekerabatan Resam berkaitan dengan upaya menghidupkan kembali Kesultanan Siak Sri Inderapura. Penulis juga mewawancarai beberapa pihak lain terkait dengan kasus ini, seperti Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Siak dan pegawai Istana Siak yang pernah berurusan dengan para pengklaim sultan Siak.

Sumber-sumber yang telah diperoleh akan melewati tahap kritik sumber dari segi eksternal (autentisitas) dan internal (kredibilitas). Kritik sumber ini sekaligus memilah sumber yang relevan bagi penulisan tesis. Interpretasi memperjelas konteks dan makna dari sumber-sumber yang didapat untuk kemudian disusun secara kronologis dan kritis. Dalam konstruksi ini, penulis memakai pendekatan multidisipliner dari segi budaya dan politik. Hasil konstruksi tersebut akan menjadi karya tesis dengan judul seperti yang telah dikemukakan sebelumnya.

1.8. Sistematika Penulisan

Susunan tesis ini terdiri atas lima bab yang dijabarkan sebagai berikut. Bab I menyajikan penyebab munculnya ide penulisan karya ilmiah ini dengan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah disertai batasan, tujuan dan manfaat.

Bab ini juga dilengkapi dengan tinjauan pustaka, kerangka teoretis, serta metode dan sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan identitas Kesultanan Siak Sri Indrapura pada masanya berdaulat, dimulai saat Raja Kecil mendirikan kerajaannya pada tahun 1723 hingga Sultan Syarif Ismail menyerahkan kedaulatan Siak melalui Kontrak 1858. Penulis memberikan gambaran geografis dan demografis sebelum menjabarkan identitas yang dibangun dalam Kesultanan Siak pada masa ini, yang dibagi dalam dua periode: Kesultanan Siak di bawah Wangsa Abdul Jalil dan Wangsa Syahabuddin

Bab III menjelaskan identitas Kesultanan Siak saat telah dikuasai Belanda di bawah sistem *zelfbestuur* hingga saat wilayah Siak berada di bawah pemerintah Indonesia. Identitas Kesultanan terbagi menurut masa awal *zelfbestuur* Siak hingga pemerintahan Syarif Kasim I, masa pemerintahan Syarif Hasyim, masa pemerintahan Syarif Kasim II, serta saat kemerdekaan hingga Gerakan Swapraja Siak.

Bab IV menjelaskan identitas Kesultanan Siak setelah mangkatnya Syarif Kasim II, yang terbagi atas masa menggali dan menjaga identitas (1968-1998) dan masa setelah pembentukan Kabupaten Siak (1998-2023). Pada periode terakhir, pembahasan juga mengarah pada pembentukan Kekerabatan Resam, klaim sultan Siak baru, dan penjelasan di balik kontroversi tersebut. Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan tesis ini.